

KKN UGM Tinggalkan Jejak Positif, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Arti Kolaborasi Pembangunan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., mengapresiasi kontribusi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata “Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah menjalankan program pengabdian selama 50 hari di Kabupaten Buton Selatan. Apresiasi itu disampaikan saat menghadiri malam puncak Blue Coast Eco Festival di Waburi Park, Desa Gaya Baru, Kecamatan Lapandewa, Minggu (2/8/2026). Festival tersebut menjadi penanda be-

rakhirnya rangkaian kegiatan KKN-PPM UGM Tahun 2026 yang melibatkan 30 mahasiswa. Selama berada di Buton Selatan, para mahasiswa melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di dua wilayah, yakni Desa Gaya Baru dan Desa Gerak Makmur. Menurut Bupati Muhammad Adios, keterlibatan perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam memperkuat pembangunan daerah. Ia menilai kehadiran mahasiswa UGM tidak hanya menghadirkan program kerja, tetapi juga

Lanjut ke Hal: 7



BUPATI AZHARI TAWARKAN TRANS MARINE

UNTUK PERKUAT EKONOMI BIRU INDONESIA, BUTON TENGAH MENDAPAT DUKUNGAN TEKNIS DARI KSP



• Bupati Azhari usulkan konsep Trans Marine jadi model percontohan nasional.



• Integrasikan transmigrasi, ekonomi biru, dan potensi kelautan daerah.



• Paket usaha terpadu: keramba, hunian, kapal dan pendampingan intensif untuk anak muda.



• KSP siap fasilitasi koordinasi lintas kementerian untuk pembahasan lebih lanjut.



• Dorong pengembangan lewat KEK atau PSN Kelautan, libatkan investor swasta.

“Trans Marine diharapkan jadi model yang dapat direplikasi di wilayah kepulauan lainnya.”

— Dr. Azhari
Bupati Buton Tengah



Laporan: Ardi,
Baubau
Post-Durasi Times

JAKARTA, k BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mendorong konsep Transmigrasi Maritim atau Trans Marine menjadi model percontohan nasional untuk pembangunan masyarakat kepulauan. Gagasan tersebut mendapat respons positif dan dukungan teknis dari Kantor Staf Presiden (KSP) untuk dibawa ke pembahasan lintas kementerian.

Usulan itu disampaikan Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, saat melakukan audiensi dengan Kepala KSP Prof. Dr. Jenderal (Purn) Dudung Abdul Rachman di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Konsep Trans Marine dikembangkan bersama ahli transmigrasi Prof. Suratman dengan menggabungkan program transmigrasi, pengembangan ekonomi biru, dan pemanfaatan potensi kelautan daerah.

“Konsep ini kami dorong agar tidak berhenti sebagai program daerah, tetapi dapat menjadi model yang

Lanjut ke Hal: 7

Tiga Kebakaran Serentak Bayangi Baubau, BPBD Minta Warga Hentikan Bakar Sampah



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Tiga kebakaran terjadi hampir bersamaan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/8/2026), saat kondisi cuaca kering meningkatkan risiko api cepat menjalar. Peristiwa di kawasan Palagimata, Kelurahan Sulaa, dan Kelurahan Waborobo itu berhasil

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Samahuddin Tukar Pengalaman soal Kepemimpinan dan Pembangunan Saat Bertemu Diruang Tunggu Bandara

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Penguatan birokrasi dan ketepatan menentukan prioritas pembangunan menjadi perhatian Bupati Buton Selatan Muhammad Adios setelah berdiskusi dengan mantan Bupati Buton Tengah periode 2017-2022, Samahuddin, di ruang tunggu bandara, Rabu (5/8/2026). Pertemuan yang ber-



langsung di sela perjalanan keduanya itu dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman mengenai kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah.

Adios menilai pengalaman kepala daerah terdahulu penting sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan. Masukan Samahuddin, kata dia, dapat menjadi ref-

Lanjut ke Hal: 7

Bapas Baubau Gandeng Rumah BUMN Muna Perkuat UMKM Klien Pemasarakatan



Laporan: Ardi

MUNA, BP- Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Baubau menjajaki kerja sama dengan Rumah BUMN Muna untuk memperluas dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola klien pemasarakatan di Kabupaten Muna. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus mendorong kemandirian ekonomi klien. Penjajakan kemi-

traan dilakukan Kepala Bapas Baubau dengan Rumah BUMN Muna, program binaan PLN Peduli, pada Kamis (6/8/2026). Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi Bapas Baubau membangun jejaring dengan berbagai pihak agar proses pembimbingan klien tidak hanya berfokus pada pendampingan, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi. Rumah BUMN Muna diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam mem-

berikan dukungan kepada klien Bapas yang menjalankan UMKM di wilayah Kabupaten Muna. Dukungan tersebut berpotensi mencakup pengembangan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas produk, pemasaran, serta perluasan jejaring usaha.

“Kami berharap Rumah BUMN Muna dapat mendukung, bahkan membantu mengembangkan UMKM milik klien Bapas yang berada di

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Tawarkan Trans Marine untuk Perkuat Ekonomi Biru Indonesia, Buton Tengah Mendapat Dukungan Teknis dari KSP

bisa direplikasi di wilayah kepulauan lainnya,” kata Azhari dalam pertemuan tersebut.

Skema yang ditawarkan menempatkan Buton Tengah sebagai lokasi percontohan dengan sasaran warga lokal usia muda. Mereka akan diberdayakan melalui paket usaha terpadu yang mencakup keramba, hunian, dan kapal, serta mendapatkan pendampingan intensif sehingga kegiatan ekonomi kelautan tidak berhenti pada penyediaan sarana, tetapi berkembang menjadi ekosistem usaha.

Pemerintah daerah juga mengusulkan agar model tersebut dikembangkan dalam kerangka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Proyek Strategis Nasional (PSN) Kelautan. Keterlibatan investor swasta menjadi bagian dari rancangan untuk memperkuat pembiayaan, menciptakan lapangan kerja, sekaligus membangun rantai ekonomi berbasis sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap gagasan itu dinilai relevan dengan arah pem-

angunan kelautan Indonesia. Secara historis, Indonesia telah memperjuangkan konsep negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Prinsip tersebut kemudian memperoleh pengakuan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, yang menempatkan negara kepulauan sebagai salah satu rezim khusus dalam hukum laut internasional. Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985.

Dalam perkembangan lebih mutakhir, agenda ekonomi biru juga semakin mendapat perhatian internasional. Pada 2022, pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan National Blue Agenda Actions Partnership yang menempatkan kesehatan laut, pangan biru, inovasi biru, dan pembiayaan biru sebagai bagian penting pembangunan

berkelanjutan. Pada 2023, Indonesia juga meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru Nasional 2045.

“Karena itu, kami berharap ada koordinasi lintas kementerian agar konsep ini dapat dikaji secara komprehensif dan disiapkan sebagai model percontohan,” ujar Azhari. KSP selanjutnya akan mendukung koordinasi teknis melalui rapat lintas kementerian untuk membahas pengembangan konsep tersebut.

Selain membahas Trans Marine, dalam audiensi itu Azhari menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan sejumlah proyek strategis di Buton Tengah. Agenda tersebut meliputi RSUD Buton Tengah, Gedung Sekolah Rakyat Terpadu No. 1, peluncuran Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Batalyon Infanteri 870/Sangiawambulu, serta transformasi kampus STEM kemaritiman. Keseluruhan agenda itu diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan sektor kemaritiman Buton Tengah. (*)

KKN UGM Tinggalkan Jejak Positif, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Arti Kolaborasi Pembangunan

membangun semangat baru di tengah masyarakat.

“Kehadiran adik-adik mahasiswa KKN UGM di tengah masyarakat di dua desa tidak hanya membantu berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga membawa energi positif dan kemajuan bagi Buton Selatan,” ujar Muhammad Adios.

Malam puncak Blue Coast Eco Festival turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Buton Selatan Ny. Hj. Siti Norma Adios, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, staf ahli bupati, para asisten Setda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian lingkup Pemkab Buton Selatan, Kepala Bank Sultra Capem Batauga, Kapolsek Lapandewa, perwakilan Koramil Lapandewa, Ketua GEKRAF, Ketua Dharma Wanita Persatuan, camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat.

Bupati menambahkan, pengalaman pengabdian di Buton

Selatan diharapkan menjadi bagian penting dari perjalanan akademik dan sosial para mahasiswa. Ia berharap para peserta KKN UGM tetap memiliki ikatan emosional dengan daerah yang dikenal sebagai Negeri Beradat tersebut.

“Kelak adik-adik mahasiswa akan menjadi pemimpin di berbagai bidang. Saya berharap Buton Selatan tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup dan pengabdian kalian,” katanya.

Program KKN-PPM UGM tersebut sejalan dengan perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan yang semakin mendapat perhatian dunia. Secara historis, keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat telah berkembang sejak dekade 1970-an melalui berbagai gerakan pengabdian berbasis komunitas. Di Indonesia, program Kuliah Kerja Nyata mulai berkembang luas sejak era

1970-an sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Sementara secara global, pendekatan pembangunan berbasis kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat semakin kuat setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkenalkan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2015. Model kolaborasi seperti yang dilakukan melalui KKN UGM di Buton Selatan menjadi salah satu upaya memperkuat pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Blue Coast Eco Festival akhirnya menjadi ruang pertemuan antara dunia akademik, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mendorong kemajuan daerah. (*)

Tiga Kebakaran Serentak Bayangi Baubau, BPBD Minta Warga Hentikan Bakar Sampah

sil dikendalikan setelah BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta mendapat dukungan masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau, Dr. Moh. Tasdik, SH, M.Si., mengatakan asesmen awal menunjukkan ketiga kejadian diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api kemudian merambat ke area di sekitarnya. Meski demikian, petugas masih mendalami penyebab pasti masing-masing kebakaran.

Kebakaran paling berdampak terjadi di Palagimata, tepatnya di belakang Kantor BPKAD Kota Baubau. Sebuah bangsal kayu hangus terbakar dan seorang warga mengalami luka cukup serius. Kerugian materiil akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Adapun kebakaran di belakang Perumahan Ceceria, Kelurahan Sulaa, dan di Kelurahan Waborobo tidak menimbulkan korban jiwa.

Penanganan tiga lokasi yang

berlangsung hampir bersamaan membuat personel dan peralatan harus dibagi. Setelah menerima laporan warga, BPBD segera berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau. Operasi pemadaman dipimpin langsung Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau, H. La Ode Ali Hasan, SE, M.Si., bersama personel gabungan hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan.

“Partisipasi warga menjadi sangat penting mengingat personel dan peralatan harus dibagi untuk menangani tiga lokasi kebakaran yang terjadi hampir bersamaan,” kata Moh. Tasdik. Menurut dia, keterlibatan warga di Sulaa dan Waborobo turut membantu mencegah api meluas ke kawasan permukiman.

Tasdik meminta masyarakat tidak membakar sampah secara terbuka tanpa pengawasan, terutama dalam kondisi cuaca kering dan berangin. Ia juga meminta setiap kejadian kebakaran maupun pohon tumbang

segera dilaporkan agar petugas dapat melakukan penanganan sejak dini. “Jangan menunggu api membesar. Laporan cepat dari masyarakat merupakan kunci keberhasilan penanganan,” ujarnya. Peringatan tersebut sejalan dengan pengalaman Indonesia menghadapi kebakaran dalam skala lebih luas. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan nasional mencapai sekitar 1,65 juta hektare pada 2019, salah satu tahun ketika fenomena El Nino memperkuat kondisi kering. Pemerintah mencatat faktor cuaca, panjangnya hari tanpa hujan, serta aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan menjadi bagian dari faktor yang memperbesar risiko kebakaran.

Ancaman kebakaran akibat kondisi panas dan kering juga menjadi persoalan global. Pada musim kebakaran 2019-2020, Australia mengalami apa yang dikenal sebagai Black Summer, dengan kebakaran yang menurut CSIRO membakar lebih dari 24

Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Samahuddin Tukar Pengalaman soal Kepemimpinan dan Pembangunan Saat Bertemu Diruang Tunggu Bandara

referensi untuk menentukan kebijakan, menyusun skala prioritas pembangunan, serta menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kapasitasnya agar pelayanan publik semakin efektif.

“Pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga. Berbagai masukan yang kami peroleh menjadi referensi dalam mengevaluasi kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, serta memperkuat birokrasi melalui penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya,” ujar Adios.

Dalam percakapan tersebut, Samahuddin membagikan pengalamannya selama memimpin Buton Tengah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak ditentukan oleh banyaknya program semata. Pemerintah, menurut dia, harus mampu memilah kebutuhan masyarakat dan mengarahkan sumber daya pada program yang memiliki dampak paling besar.

Persoalan sumber daya aparatur juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Samahuddin menyampaikan pandangan mengenai seleksi dan penempatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dinamika yang biasanya muncul ketika pemerintah mengambil kebijakan strategis. Penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemampuan dinilai menjadi salah satu kunci membangun organisasi pemerintahan yang solid.

Gagasan tersebut sejalan dengan arah reformasi birokrasi Indonesia yang menguat setelah Reformasi 1998. Pengelolaan

aparatur kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menempatkan sistem merit, kompetensi, kinerja, dan profesionalitas sebagai bagian penting dalam manajemen ASN. Secara internasional, prinsip serupa berkembang dalam agenda reformasi administrasi publik sejak akhir abad ke-20, ketika banyak negara mendorong birokrasi yang lebih profesional, berorientasi kinerja, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagi Adios, pertukaran pengalaman tersebut juga menunjukkan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah terhadap gagasan dari berbagai pihak. Komunikasi dengan mantan kepala daerah dapat memperluas sudut pandang sebelum pemerintah menetapkan kebijakan, terutama dalam menghadapi tantangan birokrasi dan pembangunan yang terus berkembang.

“Membangun daerah membutuhkan keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dan gagasan. Pertukaran pengalaman seperti ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pembangunan yang lebih terarah demi kesejahteraan masyarakat Buton Selatan,” kata Adios.

Pertemuan di ruang tunggu bandara itu berlangsung dalam suasana santai, tetapi menghasilkan pembahasan mengenai isu strategis pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan, profesionalitas birokrasi, penentuan prioritas pembangunan hingga orientasi pelayanan publik. Adios berharap pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buton Selatan. (*)

Bapas Baubau Gandeng Rumah BUMN Muna Perkuat UMKM Klien Pemasyarakatan

wilayah Muna,” ujar Kepala Bapas Baubau dalam pertemuan tersebut.

Ia mengatakan penguatan aspek ekonomi penting dalam proses pembimbingan karena klien membutuhkan ruang untuk mengembangkan keterampilan dan produktivitas setelah menjalani proses pemasyarakatan. Karena itu, kolaborasi antar lembaga diharapkan mampu menciptakan peluang usaha yang lebih berkelanjutan bagi klien.

Upaya tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan pemberdayaan UMKM di Indonesia yang dalam beberapa dekade terakhir semakin menempatkan usaha kecil sebagai bagian penting dari penguatan ekonomi masyarakat. Secara historis, pengembangan UMKM juga menjadi salah satu instrumen pemulihan ekonomi nasional, termasuk setelah krisis ekonomi Asia 1997-1998 ketika usaha skala kecil relatif berper-

an dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara global, pendekatan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan juga berkembang sebagai bagian dari strategi reintegrasi sosial. Program pembinaan berbasis keterampilan, pekerjaan, dan kewirausahaan digunakan di berbagai negara untuk membantu mantan warga binaan membangun kembali kehidupan ekonomi sekaligus mengurangi risiko kembali melakukan pelanggaran hukum.

“Kami ingin memastikan klien tidak hanya mendapatkan bimbingan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi,” kata Kepala Bapas Baubau.

Melalui peninjauan dengan Rumah BUMN Muna, Bapas Baubau berharap terbentuk ekosistem pembimbingan yang lebih kolaboratif. Klien pemasyarakatan di Kabupaten Muna diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap peningkatan kapasitas usaha, pemasaran, kualitas produk, dan jaringan bisnis sehingga dapat tumbuh lebih produktif serta kembali berperan positif di tengah masyarakat. (*)

juta hektare lahan dan menyebabkan 33 orang meninggal secara langsung. Catatan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi bahan bakar kering, cuaca panas, dan angin dapat membuat api berkembang cepat serta sulit dikendalikan.

Sehari sebelum tiga kebakaran itu, BPBD Baubau juga menangani pohon tumbang yang menut-

up badan Jalan Poros Baubau-Pasarwajo di kawasan Wakonti, Rabu (5/8/2026). Saat petugas tiba, penanganan telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau bersama masyarakat dan personel Batalyon 823/Wakaaka sehingga lalu lintas kembali normal. “Api sekecil apa pun dapat merambat sangat cepat dan berubah menjadi kebakaran besar hanya dalam hitungan menit,” kata Tasdik. (*)

Prabowo Panggil Menhan, Panglima, hingga 3 Kepala Staf TNI Bahas Program TNI, dari Jembatan Desa hingga Listrik di Perbatasan



Presiden Prabowo Subianto

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto mengarahkan TNI memperkuat perannya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arahan itu disampaikan saat Prabowo menerima Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta kepala staf tiga matra di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8).

Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut ialah sejumlah program pembangunan yang dijalankan TNI di berbagai daerah. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para kepala staf melaporkan progres pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Selain infrastruktur penghubung, TNI juga

melaporkan pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia. Program listrik masuk desa turut berjalan sepanjang tahun ini, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terluar yang masih menghadapi keterbatasan akses energi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan program tersebut menjadi bagian dari kontribusi TNI terhadap agenda pembangunan pemerintah. “Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI beserta para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dijalankan TNI,” kata Teddy melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (6/8).

Pertemuan itu juga membahas rencana bakti sosial TNI yang akan digelar secara

serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan TNI dengan rakyat.

“Prabowo secara khusus mengarahkan agar pada peringatan HUT ke-81 RI, TNI menghadirkan sesuatu yang spesial bagi masyarakat,” ujar Teddy. Presiden didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan tersebut.

Keterlibatan TNI dalam pembangunan memiliki akar sejarah sejak masa awal kemerdekaan. Konsep kemandirian TNI dan rakyat kemudian berkembang da-

lam berbagai kegiatan teritorial, termasuk pembangunan infrastruktur melalui program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Secara internasional, keterlibatan militer dalam dukungan kemanusiaan dan pembangunan juga dikenal di sejumlah negara, terutama ketika pemerintah menghadapi kebutuhan infrastruktur dasar, bencana, atau kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Teddy menegaskan, pelaksanaan berbagai program tersebut memerlukan kontribusi TNI di luar fungsi pertahanan. “TNI terus memperkuat perannya, tidak hanya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Dalam konteks itu, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, perluasan listrik desa, dan bakti sosial menjadi instrumen untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang membutuhkan dukungan negara. Program-program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas dan pelayanan dasar menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.(*).

Golkar Usul Wakil Kepala Daerah Ditunjuk, Bukan Dipilih dalam Pilkada

Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Wacana pemilihan kepala daerah tanpa wakil mulai mendapat perhatian lintas fraksi di DPR. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mendukung gagasan tersebut, tetapi meminta pemerintah dan DPR sejak awal menyiapkan mekanisme penggantian apabila kepala daerah terpilih berhalangan tetap.

Perdebatan mengenai keberadaan wakil kepala daerah muncul setelah anggota Fraksi PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengusulkan agar pilkada hanya memilih kepala daerah. Menurut dia, wakil kepala daerah selama ini kerap berfungsi sebagai vote getter, sementara kewenangan pemerintahan yang dimiliki relatif terbatas. Gagasan itu kemudian berkembang menjadi pembahasan lintas fraksi di Komisi II.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengakui ketidakseimbangan peran kepala daerah dan wakilnya masih menjadi persoalan di sejumlah daerah. Bahkan, hubungan keduanya tidak jarang berujung pada konflik terbuka hingga perkara hukum. “Sekarang memang ada kesan kalau wakil tidak difungsikan. Tetapi di beberapa daerah, ada juga yang kepala daerah dan wakilnya ribut,” ujar Saleh, Kamis lalu.

Irawan menilai desain kelembagaan tersebut perlu dikaji

ulang agar pemilihan kepala daerah tidak menghasilkan persoalan baru dalam menjalankan pemerintahan. Ia mengusulkan wakil kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung bersama kepala daerah, melainkan ditunjuk berdasarkan kebutuhan pemerintahan.

Menurut Irawan, jumlah deputi atau wakil kepala daerah juga dapat disesuaikan dengan beban kerja setiap daerah. Dalam model yang ia tawarkan, seorang kepala daerah bahkan dimungkinkan memiliki dua hingga tiga deputi dengan pembagian tugas tertentu. “Mungkin deputi atau wakil kepala daerah bisa 2-3 tergantung beban pekerjaannya,” kata Irawan saat dihubungi, Kamis (6/8).

Namun, skema tersebut menyisakan persoalan ketika kepala daerah terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap. Irawan meminta aspek itu menjadi bagian penting dalam pembahasan regulasi karena sistem pilkada tanpa wakil tidak boleh menimbulkan kekosongan kepemimpinan di tengah masa jabatan. “Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana kalau kepala daerah yang sebelumnya dipilih itu berhalangan tetap,” ujarnya.

Ia menyebut gagasan pilkada tanpa wakil bukan sepenuhnya baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut Irawan, ketentuan serupa pernah muncul dalam Perppu Pilkada

yang diterbitkan pada 2014. Karena itu, pembahasan saat ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pengalaman sebelumnya sekaligus merumuskan mekanisme pengisian jabatan yang lebih jelas.

Secara historis, Indonesia telah beberapa kali mengubah desain pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung mulai diterapkan pada 2005 setelah perubahan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem tersebut kemudian terus mengalami penyesuaian melalui berbagai regulasi. Di sejumlah negara lain, desain eksekutif daerah juga beragam; ada yang memilih kepala daerah tanpa wakil secara langsung, sementara posisi pendamping atau deputi diisi melalui mekanisme penunjukan.

Irawan mengatakan DPR dan pemerintah masih harus menentukan cara pengisian jabatan apabila kepala daerah berhalangan tetap. Opsi yang dibahas dapat berupa penunjukan berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya atau pemilihan baru untuk mengisi sisa masa jabatan. “Apakah seperti model penggantian lembaga negara yang terbanyak kedua dan seterusnya atau pemilihan baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan,” katanya.(*)

Sidang Tahunan MPR 2026 Tanpa Baju Adat, Peserta Pria Kenakan PSL

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan pelaksanaan Sidang Tahunan 2026 berlangsung tanpa penggunaan pakaian adat. Sidang yang dijadwalkan pada Jumat, 14 Agustus 2026, itu akan mewajibkan peserta laki-laki mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sedangkan peserta perempuan menyesuaikan ketentuan busana yang berlaku.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan perubahan ketentuan busana tersebut menjadi salah satu bagian dari persiapan agenda kenegaraan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun



ke-81 Kemerdekaan RI. Menurut dia, secara umum pelaksanaan sidang tahun ini tidak berbeda dengan agenda serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

“Enggak (baju adat), kita pakai pakaian sipil lengkap untuk laki-laki, untuk

perempuan menyesuaikan,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8).

Sidang Tahunan 2026 juga dijadwalkan dimulai lebih pagi. Pengaturan waktu tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian sidang dapat disele-

saikan sebelum pelaksanaan salat Jumat. Pemilihan 14 Agustus dinilai menjadi waktu paling ideal karena agenda kenegaraan tersebut harus digelar dalam rentang waktu menjelang peringatan 17 Agustus.

“Memang kita tidak bisa melaksanakan itu

di hari-hari sebelumnya karena memang batasannya kan tiga hari dari tanggal 17 maksimalnya. Jadi memang tanggal 14 itu yang paling ideal,” ujar Eddy.

Selain membahas teknis pelaksanaan, MPR menyiapkan undangan bagi seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu. Pimpinan MPR akan menyampaikan undangan secara langsung kepada para mantan kepala negara dan wakil kepala negara sebagai bentuk penghormatan. Kehadiran mereka belum dapat dipastikan karena undangan resmi masih dalam proses penyampaian.

Tradisi Sidang Tahunan MPR sendiri mulai mengemuka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada

2015. MPR ketika itu menyelenggarakan sidang pada 14 Agustus berdasarkan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagai forum penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada publik.

Dalam perkembangannya, pakaian adat sempat menjadi bagian yang menonjol dalam agenda tersebut. Pada Sidang Tahunan 2024, misalnya, Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat Betawi, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Palembang. Namun, pada 2026, MPR kembali menetapkan pakaian formal sebagai ketentuan bagi peserta laki-laki.

Fenomena busana dalam forum parlemen juga memiliki konteks internasional. Parlemen Selandia Baru,

misalnya, tidak menetapkan satu model pakaian khusus dan memperbolehkan anggota mengenakan pakaian formal dari budaya yang mereka identifikasi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa aturan busana di lembaga legislatif dapat berubah mengikuti tradisi, identitas budaya, dan tata acara masing-masing negara.

Dengan ketentuan tersebut, Sidang Tahunan MPR 2026 akan mengutamakan pakaian formal bagi peserta laki-laki, sementara peserta perempuan diberikan penyesuaian. Agenda ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.(*)

Menaker Minta Sultra Siapkan 10.000 Talenta untuk Hadapi Era Kerja Baru



SULTRA, BP- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan 10.000 peserta program pengembangan kompetensi pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersempit kesenjangan antara kemampuan lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja yang berubah cepat akibat teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, serta perubahan demografi.

Permintaan itu disampaikan Yassierli saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026). Kuliah umum bertema “Peran Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Talenta Masa Depan” tersebut mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan kalangan generasi muda dalam membahas arah pengembangan sumber daya manusia.

Yassierli mengatakan perubahan struktur ketenagakerjaan tidak lagi berlangsung secara perlahan. Perkembangan Artificial Intelligence (AI), transisi energi hijau, serta perubahan demografi dan berkembangnya ekonomi berbasis pelayanan menjadi faktor yang mengubah kebutuhan terhadap tenaga kerja.

Menurut dia, perubahan itu akan menciptakan pekerjaan baru sekaligus menggeser sejumlah pekerjaan yang selama ini tersedia. Karena itu, kemampuan pekerja untuk meningkatkan dan memperbarui kompetensi menjadi semakin menentukan daya saing mereka di pasar kerja.

Ada empat sektor yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi masa depan. Keempatnya ialah ekonomi digital dan kreatif, ekonomi berbasis teknologi dan AI,

ekonomi hijau, serta ekonomi yang berorientasi pada pelayanan manusia.

Persoalan yang dihadapi Indonesia, kata Yassierli, bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Data yang diparkannya menunjukkan sekitar 33,5 persen lulusan perguruan tinggi secara nasional bekerja di luar bidang keilmuannya. Pada saat yang sama, hampir satu juta lulusan perguruan tinggi masih menganggur.

“Kampus harus semakin dekat dengan dunia industri dan pemerintah agar lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja,” ujar Yassierli.

Kesenjangan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong Program Pemagangan Nasional. Melalui program itu, lulusan memperoleh pengalaman kerja langsung di perusahaan sehingga terdapat jembatan antara pengetahuan akademik dan keterampilan praktis yang dibutuhkan industri.

Yassierli juga meminta dunia usaha di Sulawesi Tenggara memanfaatkan program tersebut. Ia secara khusus mendorong perusahaan memberikan peluang kepada lulusan lokal untuk mengikuti pemagangan dan memprioritaskan mereka dalam proses perekrutan.

“Melalui kesempatan ini, saya mengajak dunia industri untuk memanfaatkan Program Pemagangan Nasional dan memprioritaskan perekrutan lulusan-lulusan dari Sulawesi Tenggara,” kata dia.

Bagi Sulawesi Tenggara, penguatan kualitas tenaga kerja menjadi isu strategis karena daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Gubernur

Sultra Andi Sumangerukka mengatakan kekayaan sumber daya alam tidak akan menghasilkan manfaat optimal tanpa dukungan manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.

Pandangan tersebut disampaikan Andi Sumangerukka setelah menyambut Yassierli di Bandara Halu Oleo, Kendari. Dalam perjalanan menuju UMK, keduanya juga berdiskusi mengenai potensi daerah serta tantangan peningkatan kualitas tenaga kerja di Sulawesi Tenggara.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sultra, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan beserta rombongan di Bumi Anoa,” ujar Andi Sumangerukka.

Gubernur menilai kunjungan Menteri Ketenagakerjaan tidak sebatas agenda akademik. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan generasi muda dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan ekonomi.

Dorongan untuk mendekatkan pendidikan tinggi dengan dunia kerja bukan persoalan baru. Sejak memasuki era industrialisasi, perubahan teknologi telah berkali-kali memaksa sistem pendidikan dan ketenagakerjaan menyesuaikan diri. Revolusi Industri pertama pada abad ke-18 mengubah pekerjaan berbasis tenaga manual melalui penggunaan mesin, sedangkan Revolusi Industri 3.0 pada akhir abad ke-20 mempercepat penggunaan komputer dan otomasi.

Memasuki abad ke-21, perubahan berlangsung semakin cepat dengan hadirnya internet, komputasi awan, robotika, dan

AI. Forum Ekonomi Dunia dalam berbagai laporan mengenai masa depan pekerjaan juga menempatkan perubahan teknologi, transformasi hijau, dan perubahan demografi sebagai faktor penting yang akan menentukan jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan pada masa mendatang.

Indonesia menghadapi tantangan serupa. Transformasi digital yang semakin luas membuat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja tidak lagi cukup dipenuhi hanya dengan ijazah akademik. Kemampuan digital, pemecahan masalah, komunikasi, adaptasi, serta keterampilan teknis yang relevan semakin diperlukan untuk memasuki pasar kerja.

Karena itu, Yassierli mendorong perguruan tinggi terus memperbarui kurikulum dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha. Lulusan tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga kompetensi yang dapat dibuktikan melalui sertifikasi sesuai kebutuhan industri.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diminta menyiapkan 10.000 peserta pada tahun ini dengan melibatkan seluruh lembaga terkait. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja daerah sekaligus memperluas akses lulusan terhadap pengalaman kerja.

Menutup kuliah umumnya, Yassierli menegaskan bahwa kompetensi menjadi modal utama menghadapi perubahan dunia kerja. Perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dinilai perlu bergerak bersama agar bonus demografi tidak berhenti sebagai potensi, tetapi berubah menjadi kekuatan ekonomi melalui tenaga kerja yang produktif dan kompetitif.

Kegiatan di UMK itu turut dihadiri Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Rektor UMK, Ketua Badan Pembina Harian UMK, serta para pimpinan balai Kementerian Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi Tenggara. (*)

Gubernur Sultra ASR Optimis Sultra Maimo 2026 Jadi Panggung UMKM Sultra Menuju Pasar Internasional



SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat agenda pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mendorong digitalisasi sekaligus membuka akses pasar ekspor. Langkah tersebut ditandai dengan pembukaan Sultra Maimo 2026 dan peresmian Gerai Ekspor Sultra (GETRA) di The Park Kendari, Jumat (7/8/2026).

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah pelaku usaha. Pemerintah daerah perlu memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas, mengembangkan produk, memanfaatkan teknologi, serta menjangkau konsumen yang lebih luas.

Sultra Maimo 2026 berlangsung pada 2-9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat UMKM melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, dan pengembangan pasar.

Menurut Andi, perubahan perilaku konsumen akibat perkembangan teknologi membuat digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pelaku UMKM dituntut tidak hanya menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk pemasaran dan transaksi.

“Data tersebut menunjukkan transformasi digital di Sulawesi Tenggara berkembang sangat baik. Ke depan saya berharap semakin banyak UMKM yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, sekaligus memperkuat daya saing produk lokal,” ujarnya.

Data Triwulan II 2026 menunjukkan jumlah pengguna QRIS di Sulawesi Tenggara telah mencapai sekitar 350 ribu pengguna. Angka tersebut tumbuh 23,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, jumlah merchant yang menggunakan QRIS telah menembus lebih dari 267 ribu pelaku usaha atau meningkat 28,49 persen. Sementara itu, total volume transaksi tercatat mencapai 5,23 juta transaksi.

Perkembangan tersebut memiliki latar sejarah dalam transformasi sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019 sebagai standar pembayaran berbasis kode QR dan mulai mewajibkan penggunaannya secara nasional sejak 1 Januari 2020. QRIS dirancang untuk menyederhanakan transaksi karena satu kode dapat digunakan oleh berbagai penyedia jasa pembayaran.

Perjalanan QRIS kemudian berkembang dari sekadar instrumen pembayaran domestik menuju konektivitas lintas negara. Sejak 2022, QRIS telah digunakan dalam konektivitas pembayaran antarnegara, antara lain dengan Malaysia dan Thailand, sebelum berkembang ke Singapura pada 2023. Perkembangan itu memperlihatkan bahwa infrastruktur pembayaran digital juga dapat menjadi bagian dari ekosistem perdagangan dan pariwisata lintas negara.

Dalam konteks perekonomian nasional, posisi UMKM juga memiliki bobot yang besar. Pemerintah mencatat sektor tersebut menyumbang sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja pada data yang disampaikan pada

2023. Jumlah UMKM ketika itu mencapai sekitar 65,5 juta unit atau 99 persen dari keseluruhan unit usaha.

Namun, besarnya jumlah pelaku usaha belum otomatis membuat UMKM memiliki akses yang kuat ke perdagangan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat UMKM menghadapi sejumlah hambatan untuk masuk ke pasar global, antara lain keterbatasan keterampilan, pengetahuan tentang pasar internasional, hambatan non-tarif, prosedur perbatasan, serta keterbatasan pembiayaan perdagangan.

Tantangan tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghadirkan GETRA. Melalui gerai itu, pelaku UMKM akan memperoleh layanan konsultasi, pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi ekspor sehingga proses pengembangan usaha tidak berhenti pada peningkatan produksi.

“Melalui Gerai Ekspor Sultra, kami ingin membuka peluang yang lebih luas bagi produk unggulan daerah untuk menembus pasar internasional,” kata Andi.

Potensi tersebut mencakup berbagai komoditas dan produk khas Sulawesi Tenggara, seperti hasil perikanan, kopi, olahan pangan, kerajinan, wastra, dan kuliner daerah. Namun, agar dapat bersaing di pasar global, produk-produk itu perlu memenuhi persyaratan mutu, sertifikasi, kemasan, serta ketentuan perdagangan negara tujuan.

Secara global, keterlibatan usaha kecil dan menengah dalam perdagangan internasional masih menjadi persoalan. WTO menyebut sekitar 95 persen perusahaan di dunia merupakan UMKM dan kelompok usaha tersebut menyumbang sekitar 60 persen lapangan kerja dunia. Namun, partisipasinya dalam perdagangan internasional masih menghadapi berbagai kendala.

Besarnya perdagangan dunia juga menunjukkan luasnya ruang yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. WTO mencatat perdagangan barang dan jasa komersial dunia pada 2025 meningkat 8 persen menjadi sekitar US\$34,89 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan pasar global tetap menyediakan ruang bagi produk baru, meski persaingan dan standar perdagangan juga semakin ketat.

Karena itu, Andi menilai pengembangan UMKM Sulawesi Tenggara harus diarahkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Penguatan tersebut mencakup peningkatan produktivitas, hilirisasi, pengembangan industri kreatif, serta pemanfaatan potensi unggulan daerah.

“UMKM bukan lagi sekadar program pemberdayaan masyarakat, tetapi telah menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah,” ujarnya.

Andi berharap Sultra Maimo 2026 tidak berhenti sebagai agenda promosi dan pameran produk. Menurut dia, kegiatan tersebut harus melahirkan inovasi, kemitraan, investasi, serta peluang usaha baru yang memperkuat ekosistem UMKM Sulawesi Tenggara.

Dengan digitalisasi sebagai pintu masuk dan GETRA sebagai fasilitas penghubung ke pasar internasional, pemerintah daerah berharap semakin banyak produk lokal yang mampu naik kelas. Sasaran akhirnya bukan hanya meningkatkan transaksi di dalam daerah, melainkan membawa produk UMKM Sulawesi Tenggara masuk ke rantai perdagangan nasional dan global. (Mashuri)

Angkatan Pertama SNT Buton Tengah Lulus, Bupati Azhari Tekankan Pendidikan Karakter

BUPATI AZHARI
UCAPKAN
SELAMAT KELULUSAN
ANGKATAN PERTAMA
SNT BUTON TENGAH



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Buton Tengah memasuki babak baru setelah peserta didik angkatan pertamanya dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menyampaikan apresiasi atas kelulusan tersebut. Ia berharap para siswa tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan menjadi generasi yang kelak memberikan manfaat bagi daerah serta negara.

"Saya mengucapkan selamat kepada

angkatan pertama SNT Buton Tengah. Jadilah pribadi yang berguna bagi daerah dan negara serta tetap berbakti kepada orang tua," kata Azhari.

SNT Buton Tengah tercatat sebagai salah satu dari 17 lokasi nasional yang beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027. Kepastian tersebut tercantum dalam dokumen resmi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan PNFI Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 3 Agustus 2026.

Menurut Azhari, hadirnya SNT di Buton Tengah merupakan hasil dukungan berbagai pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Sulawesi Tenggara, hingga masyarakat setempat. Ia juga secara khusus menyampaikan peng-

hargaan kepada masyarakat Mawasangka Tengah (Masteng) yang menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah.

"Keikhlasan masyarakat Mawasangka Tengah menghibahkan lahan menjadi bagian penting dari hadirnya sekolah ini. Sekarang lahan tersebut menjadi tempat untuk membentuk generasi unggul," ujar Azhari.

Setelah kelulusan SPMB, penyelenggara akan memasuki tahapan MPLS untuk memperkenalkan lingkungan dan ekosistem pendidikan terintegrasi kepada peserta didik. Tahapan tersebut sekaligus menjadi momentum membangun hubungan antara sekolah, pemerintah, peserta didik, dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan.

Secara historis,

perhatian terhadap pemerataan pendidikan telah menjadi bagian penting pembangunan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak warga negara memperoleh pendidikan sekaligus kewajiban pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Dalam perkembangan global, komitmen tersebut kemudian sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 untuk menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat.

"Kami berharap SNT menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang merata dan berkarakter di Buton Tengah," kata Azhari. (*)

Bupati Buton Utara Afiruddin Lepas 42 Peserta Menuju Jambore Nasional XII



Laporan: Kasrun

BUTON UTARA, BP- Sebanyak 42 anggota Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buton Utara, Sulawesi Tenggara, diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Ragunan Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen tersebut dilepas Bupati Buton Utara Afirudin Mathara, S.H., M.H., Kamis (6/8/2026).

Pelepasan berlangsung di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dan dihadiri Wakil Bupati Buton Utara Rahman, S.K.M., Sekretaris Daerah Muhammad Hardhy Muslim, S.H., M.Si., Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Buton Utara Drs. Firdaus Jamaludin, pengurus Kwarcab, pembina, serta orang tua peserta.

Afirudin yang juga Ketua Majelis Pembina Gerakan Pramuka Cabang Buton Utara meminta seluruh peserta memanfaatkan Jamnas sebagai ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman. Para peserta didik

penggalang putra dan putri diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh.

"Ikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman sebanyak-banyaknya," kata Afirudin.

Selain kemampuan dan pengalaman, Bupati menekankan pentingnya sikap selama kontingen berada di Jakarta. Ia meminta peserta menjaga nama baik daerah dengan menunjukkan karakter Pramuka yang disiplin, santun, terampil, dan memiliki akhlak mulia.

"Tunjukkan bahwa Pramuka Buton Utara adalah Pramuka yang disiplin, santun, terampil dan berakhlak mulia," ujarinya.

Pesan lain yang disampaikan Afirudin berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan peserta. Ia meminta anggota kontingen menjaga kekompakan, mematuhi arahan pembina, serta saling menjaga selama mengikuti kegiatan Jamnas. "Jaga kesehatan dan kekompakan, dengarkan arahan

pembina, dan saling menjaga, karena keselamatan kalian adalah prioritas," katanya.

Jamnas XII 2026 mengangkat tema "Berkreasi, Berinovasi, Terampil, dan Mandiri untuk Swasembada Pangan." Tema tersebut dinilai relevan dengan arah pembangunan Buton Utara yang juga mendorong kemandirian dan penguatan sektor pangan.

Secara historis, Jambore Nasional merupakan salah satu agenda besar Gerakan Pramuka yang mempertemukan anggota Pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia. Gerakan Pramuka sendiri secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada 14 Agustus 1961, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Di tingkat internasional, kegiatan jambore kepanduan telah berkembang sejak World Scout Jamboree pertama di London pada 1920, yang menjadi salah satu tonggak pertemuan besar gerakan kepanduan dunia. (*)

Buton Tengah Bidik Proyek Percontohan Ekonomi Biru, Kemetrans Siap Turun

Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah membuka peluang pengembangan kawasan percontohan ekonomi biru berbasis masyarakat pesisir setelah Menteri Transmigrasi Muh. Iftitah Sulaiman Suryanegara merespons positif usulan Bupati Buton Tengah Dr. Azhari. Kementerian Transmigrasi (Kemetrans) bahkan menyiapkan kunjungan tim ke Buton Tengah untuk meninjau kesiapan lokasi dan membahas teknis pelaksanaan program.

Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi khusus Azhari dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Sabtu (1/8/2026). Pertemuan berlangsung di tengah agenda Rapat Pimpinan Tinggi (Rapim) Kementerian Transmigrasi. Dalam kesempatan itu, Azhari memaparkan potensi ekonomi biru berbasis transmarine yang dapat dikembangkan di wilayah Buton Tengah.

Salah satu usulan



konkret yang disampaikan adalah penyediaan 100 unit keramba jaring apung sebagai proyek percontohan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Skema tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kelautan sekaligus menciptakan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Usulan ini kami dorong sebagai pilot project pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui potensi kelautan yang dimiliki Buton Tengah," kata Azhari dalam pemaparan tersebut.

Respons Menteri Transmigrasi kemudian berlanjut pada instruksi kepada jajaran kementerian untuk membahas aspek teknis program. Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal terkait juga menyatakan rencana kunjungan lapangan ke Buton Tengah pada minggu depan guna memastikan kesiapan lokasi serta melakukan koordinasi mengenai implementasi program.

"Segera kita rapatkan secara teknis," demikian respons Menteri Transmigrasi sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Pengembangan ekonomi biru sendiri bukan gagasan baru dalam kebijakan pembangunan global. Istilah tersebut antara lain dipopulerkan melalui buku *The Blue Economy* karya Gunter Pauli pada 2010 yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk menciptakan manfaat ekonomi dan sosial. Di tingkat global, konsep ekonomi biru kemudian berkembang sebagai pendekatan untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sumber daya laut.

Di Indonesia,

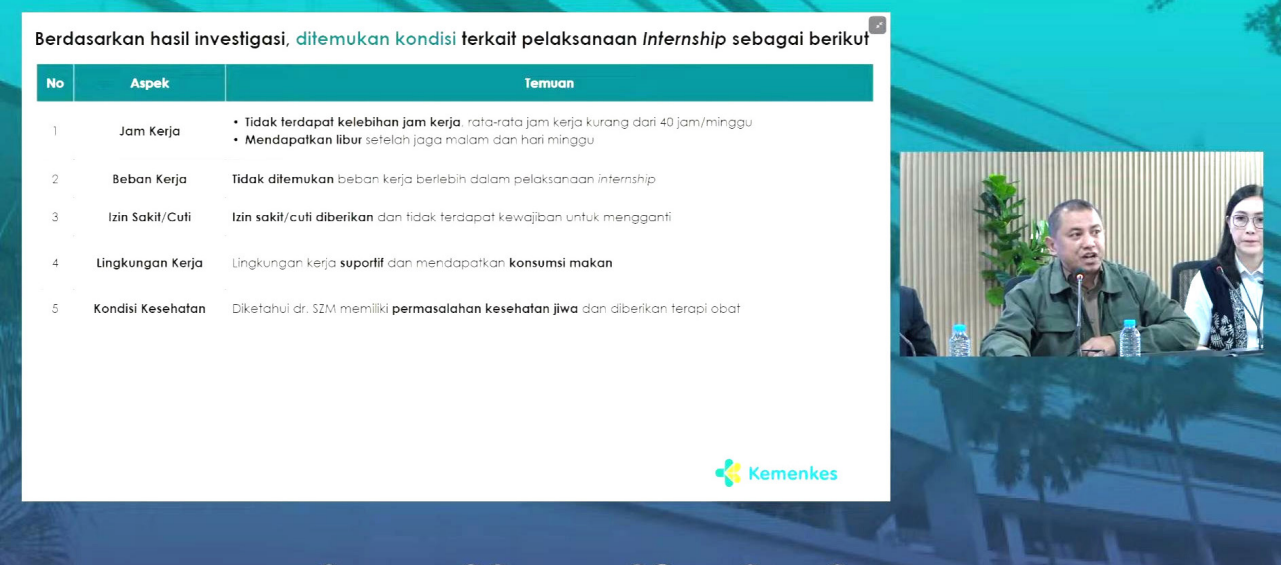
agenda ekonomi biru semakin mendapat perhatian seiring posisi strategis sektor kelautan. Bank Dunia pada 2021 mencatat Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, serta sekitar tiga perempat wilayahnya berupa laut. Lembaga tersebut juga mencatat

sektor perikanan Indonesia bernilai sekitar 27 miliar dolar AS dan menopang sekitar tujuh juta lapangan pekerjaan.

Bagi Buton Tengah, rencana pengembangan 100 keramba jaring apung menjadi langkah awal untuk menerjemahkan potensi tersebut ke dalam program pemberdayaan

masyarakat. Pemerintah daerah berharap dukungan Kemetrans dapat membuka jalan bagi terbentuknya kawasan percontohan yang dikelola secara terarah, berkelanjutan, dan mampu menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. (*)

Kemenkes Periksa 10.564 Dokter Internship Setelah Enam Peserta Meninggal



Peliput: Lisna
JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan sementara tugas lapangan 10.564 peserta Program Internsip Dokter Indonesia untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kebijakan yang berlaku 30 Juli hingga 14 Agustus 2026 itu ditempuh setelah enam peserta internship meninggal dunia sepanjang 2026 dan seluruh kasusnya diaudit serta diinvestigasi bersama tim gabungan.

Pemeriksaan mencakup medical check-up (MCU), kondisi fisik, laboratorium, dan skrining kesehatan jiwa. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar evaluasi kondisi peserta sekaligus dibandingkan dengan pencapaian kompetensi yang tercatat dalam logbook. Peserta yang dinyatakan sehat dan telah memenuhi target kompetensi dapat menyelesaikan masa internship tanpa perpanjangan. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, dr. Yuli Farianti, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan peserta menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan program. Ia menyampaikan

belasungkawa kepada keluarga enam peserta yang meninggal dan menegaskan bahwa setiap kasus menjadi bahan perbaikan tata kelola. “Setiap kejadian menjadi perhatian serius dan kami tindak lanjuti melalui audit medis serta investigasi bersama lintas pihak sebagai dasar melakukan perbaikan tata kelola,” ujar Yuli dalam konferensi pers di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Selain pemeriksaan kesehatan, Kemenkes memperkuat sistem pendampingan di tempat peserta menjalankan internship. Komunikasi antara dokter peserta, dokter pendamping, wahana, Komite Internship Kedokteran Indonesia (KIKI), pemerintah daerah, hingga Kemenkes dinilai perlu diperkuat agar gangguan kesehatan maupun persoalan lain dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. “Orang terdekat peserta internship adalah dokter pendampingnya. Karena itu, komunikasi harus berjalan baik sehingga setiap kondisi kesehatan maupun kendala yang dihadapi peserta dapat segera diketahui dan ditangani,” kata Yuli. Perbaikan terse-

but dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/594/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi. Regulasi baru mengatur batas kerja maksimal 40 jam per minggu tanpa pemadatan jam kerja, jadwal jaga, izin sakit, pendampingan, mekanisme pengaduan, serta sanksi bagi wahana dan pendamping yang tidak memenuhi ketentuan. Plt. Inspektur Jenderal Kemenkes, Rudi Supriatna Nata Saputra, mengatakan rekomendasi dari investigasi sebelumnya telah diakomodasi dalam regulasi tersebut. Namun, hasil evaluasi kasus terakhir menunjukkan pelaksanaan aturan di lapangan masih membutuhkan penguatan agar ketentuan yang telah ditetapkan berjalan konsisten. Program Internsip Dokter Indonesia sendiri bukan program baru. Pelaksanaannya pertama kali dimulai di Sumatera Barat pada Maret 2010 setelah sebelumnya dibahas dan disepakati Kemenkes, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kementerian Pendi-

dikan sejak 2008. Pada 2017, Kemenkes mencatat 43.319 dokter telah mengikuti program tersebut dengan penempatan di 34 provinsi. Secara internasional, perhatian terhadap keselamatan tenaga kesehatan dan pasien juga terus menguat. WHO pada 2019 mengadopsi resolusi tentang keselamatan pasien dan pada 2021 menetapkan Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 untuk mendorong pengurangan risiko serta bahaya yang dapat dicegah dalam pelayanan kesehatan. Evaluasi Kemenkes mendapat dukungan IDI, KKI, dan Kolegium Psikiatri yang terlibat dalam proses evaluasi dan investigasi. Ketiga organisasi tersebut menilai perlindungan peserta internship harus mencakup kesehatan fisik dan jiwa serta lingkungan kerja yang aman dan suportif. Kemenkes menegaskan pembenahan program diarahkan agar dokter muda dapat menyelesaikan proses pematapan kompetensi secara aman, profesional, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. (*)

414 Daerah Telah Eliminasi Malaria, Kemenkes Pacu Target Bebas pada 2030



JAKARTA, BP-Pemerintah Indonesia mempercepat eliminasi malaria setelah 414 kabupaten/kota atau sekitar 94,1 persen dari target daerah tahun 2026 dinyatakan telah mencapai status eliminasi. Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus, yakni mempertahankan daerah yang telah bebas penularan dan mempercepat eliminasi di wilayah yang masih menghadapi malaria. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono pada Puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia 2026 di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (28/7). Dalam kesempatan itu, Kementerian Kesehatan menyerahkan sertifikat eliminasi kepada dua provinsi dan tujuh kabupaten yang dinilai berhasil memutus penularan malaria. Dua provinsi penerima sertifikat tersebut adalah Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuh kabupaten yang memperoleh sertifikat ialah Langkat, Kepulauan Mentawai, Timor Tengah Selatan, Sumba Tengah, Purworejo, Halmahera Utara, dan Bintan. Penghargaan juga diberikan kepada pemenang Kejuaaran Nasional Mikroskopis Malaria yang digelar bersama Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI).

Di tengah capaian itu, malaria masih menjadi persoalan serius. Hingga Juli 2026, Indonesia mencatat 346.866 kasus. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan terdapat 282 juta kasus malaria dan 610 ribu kematian sepanjang 2024. Sekitar 95 persen kasus dan kematian global pada tahun tersebut terjadi di kawasan Afrika. “Pertahankan daerah yang telah eliminasi, percepat daerah yang belum, dan bersama kita wujudkan Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030,” ujar Dante. Pemerintah menjalankan Peta Jalan Eliminasi Malaria 2025-2045 melalui strategi Temukan, Obati, Kendalikan (TOKEN), Mass Drug Administration (MDA), Targeted Drug Administration (TDA), serta Interimittent Preventive Treatment (IPTf) bagi kelompok berisiko. Upaya eliminasi Indonesia sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada 2021, baru 347 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 68 persen yang mencapai status eliminasi. Kemenkes kemudian menargetkan seluruh kabupaten/kota mencapai eliminasi pada 2030 sebelum Indonesia sepenuhnya bebas malaria. Pada 2024, sebanyak 398 kabupaten/kota atau sekitar 77 persen telah menerima sertifikat eliminasi, menunjukkan peningkatan capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Andi Saguni mengatakan capaian 414 kabupaten/kota menjadi perkembangan penting dalam perjalanan eliminasi nasional. “Capaian eliminasi terus menunjukkan kemajuan dengan 414 kabupaten/kota telah berhasil mencapai eliminasi malaria,” katanya. Menurut dia, rangkaian peringatan Hari Malaria Sedunia juga dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi, kerja sama dengan WHO dan organisasi profesi, serta kapasitas tenaga laboratorium melalui pengembangan Massive Open Online Course (MOOC) pelatihan mikroskopis malaria. Mewakili daerah penerima sertifikat, Bupati Sumba Tengah Paulus Limu menyatakan pemerintah daerah akan mempertahankan status eliminasi melalui penguatan surveilans, layanan diagnosis dan pengobatan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, serta dukungan tenaga, sarana prasarana, dan anggaran. “Kami menyatakan komitmen dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan mempertahankan eliminasi malaria,” ujar Paulus. Komitmen tersebut menjadi penting karena peta jalan nasional menetapkan 2025-2030 sebagai fase percepatan penurunan beban penyakit dan pencapaian eliminasi di seluruh kabupaten/kota. (*)

PT FAREN GRAFIKA

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

UGM Nonaktifkan Dokter PPDS Elda Putri Selama Tiga Bulan Usai Cibir Pasien



Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menonaktifkan Elda Putri Rahardini selama 3 bulan dari kepesertaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Laporan: Amran

YOGYAKARTA, BP - Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menonaktifkan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Elda Putri Rahardini, selama tiga bulan setelah komentarnya terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan di media sosial menuai kecaman publik. Penonaktifan dilakukan saat proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika masih berlangsung.

Keputusan tersebut melengkapi langkah RSUP Dr. Sardjito yang lebih dahulu menghentikan sementara stase atau praktik klinis Elda di rumah sakit. Selama pemeriksaan berlangsung, dokter PPDS yang bertugas di RSUP Dr. Sardjito itu tidak diperbolehkan menjalankan praktik klinis.

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, mengatakan penonaktifan Elda merupakan bagian dari proses yang harus dijalani setelah persoalan tersebut mencuat.

“Yang bersangkutan (Elda) dinonaktifkan selama tiga bulan untuk menjalani proses dengan semestinya,” kata Made Andi saat dihubungi, Jumat (7/8) malam. FK-KMK UGM sebelumnya juga menyatakan akan menelaah dan menginvestigasi kasus tersebut.

Kasus ini bermula dari unggahan pasien bernama Yurizal Tri Chaerawan melalui akun Threads @yurizaltrich pada 22 Juli 2026. Yurizal mengaku telah menunggu delapan jam tanpa memperoleh ruangan untuk mendapatkan perawatan. Ia tidak menyebutkan nama rumah sakit karena mengaku menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Unggahan itu kemudian dipenuhi komentar warganet, termasuk sejumlah tanggapan yang dinilai sinis, menghakimi, dan tidak berempati. Dari penelusuran warganet, beberapa ko-

mentar diduga berasal dari tenaga kesehatan. Salah satunya berasal dari akun @erudarahadini yang diketahui milik Elda. Elda kemudian meminta maaf dan mengakui komentarnya tidak pantas. Sorotan publik semakin besar setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (1/8).

Selain Elda, sejumlah tenaga kesehatan yang diduga memberikan komentar terhadap Yurizal juga telah menyampaikan permintaan maaf. Polemik tersebut kini meluas ke ranah etik profesi setelah Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) melakukan investigasi. Sedikitnya 10 nama dokter hingga perawat telah diidentifikasi, dengan jumlah yang masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya pemeriksaan.

Kementerian Kesehatan sebelumnya menyayangkan komentar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dinilai minim empati terhadap pasien serta keluarganya. Pemerintah mengin-

gatkan tenaga kesehatan agar tetap menjaga etika dan profesionalisme, termasuk ketika berkomunikasi melalui media sosial. “Kita akan lihat hasil prosesnya,” ujar Made Andi, menegaskan UGM masih menunggu hasil pemeriksaan sebelum menyampaikan detail lebih lanjut.

Persoalan etika komunikasi tenaga kesehatan di ruang publik bukan perkara baru. Perkembangan media sosial dalam satu dekade terakhir membuat batas antara komunikasi pribadi dan ruang publik semakin tipis, sementara profesi kesehatan tetap menuntut kerahasiaan, empati, dan profesionalisme. Di Indonesia, penguatan tata kelola etika profesi kesehatan juga terus berkembang seiring perubahan sistem kesehatan nasional. Secara internasional, persoalan serupa muncul ketika tenaga kesehatan menggunakan media sosial untuk membicarakan pasien, sehingga berbagai organisasi profesi di sejumlah negara menekankan pentingnya menjaga privasi, martabat, serta hubungan profesional dengan pasien.

Kasus Elda kini menjadi bagian dari pemeriksaan yang melibatkan institusi pendidikan, rumah sakit, dan KKI. Penonaktifan tiga bulan dari PPDS serta penghentian sementara praktik klinis menjadi langkah awal sembari proses klarifikasi dan investigasi berjalan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran etika tersebut. (*)

Temuan 995 Senjata di Sekolah, DPR Desak Polisi Ungkap Pemilik dan Tujuan

JAKARTA, BP - Temuan 995 pucuk senjata, amunisi, aksesoris senjata, serta narkoba di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memicu desakan agar kepolisian mengusut asal-usul dan tujuan penyimpanannya. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menduga keberadaan barang-barang tersebut tidak sekadar persoalan penyimpanan, tetapi berpotensi berkaitan dengan jaringan kejahatan yang memanfaatkan lingkungan pendidikan.

Tandra meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri siapa pemilik, dari mana senjata diperoleh, untuk apa digunakan, dan bagaimana barang tersebut dapat tersimpan di lingkungan sekolah. Menurut dia, keberadaan senjata dan narkoba di tempat pendidikan merupakan ancaman serius terhadap keamanan serta keselamatan generasi muda.

“Dari mana asal usul senjata itu dan akan dipergunakan untuk apa harus dicari tahu. Termasuk temuan narkoba yang sangat mengancam generasi muda,” kata Tandra kepada wartawan, Jumat (7/8). Ia juga meminta polisi tidak berhenti pada pihak yang ditemukan menyimpan barang tersebut, tetapi mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas.

Desakan itu muncul

setelah pihak sekolah melalui kuasa hukumnya, Hermawanto, mengungkapkan bahwa 995 pucuk senjata ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan. Ruangan tersebut dibuka pada 10 dan 11 Juli karena hendak digunakan untuk kebutuhan siswa. Dari pemeriksaan awal, senjata yang ditemukan disebut mencakup senjata api, amunisi, dan sejumlah aksesoris senjata.

Namun, status dan peruntukan senjata tersebut masih menjadi persoalan yang harus dipastikan melalui pemeriksaan aparat. Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin, Alhadid Endar Putra, yang mengaku sebagai pemilik senjata, menyatakan ratusan senjata airsoft gun itu legal dan memiliki izin. “Intinya semua ada izinnnya, yang temuan 995 itu semua ada izinnnya,” ujar Alhadid.

Alhadid menjelaskan senjata tersebut telah disimpan di lokasi sejak 2020 dan semula digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah. Kegiatan itu, menurut dia, berhenti setelah pembina berinisial S meninggal dunia pada 2022. Keterangan tersebut kemudian berhadapan dengan bantahan pihak sekolah yang menyatakan tidak pernah memiliki kegiatan ekstrakurikuler menembak.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam penyelidikan. Polisi perlu memastikan apakah seluruh 995 barang yang ditemukan

merupakan airsoft gun, apakah terdapat senjata api sebagaimana disebut kuasa hukum sekolah, serta memastikan keabsahan dokumen perizinan dan kepemilikannya. Aspek lain yang juga perlu ditelusuri ialah temuan narkoba yang disebut berada di lokasi yang sama.

Secara historis, Indonesia telah memiliki aturan khusus mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api sejak masa awal kemerdekaan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi salah satu landasan hukum utama yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan senjata api secara ilegal dengan ancaman pidana berat. Di tingkat internasional, pengawasan terhadap senjata juga menjadi perhatian melalui berbagai instrumen pengendalian perdagangan dan peredaran senjata untuk mencegah penyalahgunaan serta perdagangan ilegal.

Tandra menilai kasus tersebut harus menjadi peringatan bagi aparat agar lingkungan pendidikan tidak dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang berbahaya. “Kita menyalahkan di sekolah tempat mendidik generasi bangsa ditemukan barang-barang seperti ini, apalagi senpi dan narkoba,” ujarnya. Polisi kini dituntut memastikan fakta hukum mengenai jenis senjata, status perizinan, pemilik, tujuan penyimpanan, serta kemungkinan adanya jaringan yang berada di balik temuan tersebut. (*)

Api Meluas di Gunung Bromo, 176,20 Hektare Lahan Telah Terbakar

Laporan: Alwan

SURABAYA, BP - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, meluas hingga sekitar 176,20 hektare. Medan terjal dan angin kencang menjadi kendala utama pemadaman, sementara tim gabungan mengerahkan helikopter untuk menjatuhkan air dari udara dan mencegah api merambat ke wilayah Lumajang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan, data luasan tersebut merupakan kondisi hingga Jumat (7/8) dan masih mungkin bertambah.



Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bromo di wilayah Kabupaten Probolinggo terus meluas. Data terbaru per Jumat (7/8), luas area yang terbakar mencapai sekitar 176,20 hektare.

Titik api yang masih aktif berada di bagian timur kawasan Bromo, mendekati arah Bukit B29, sedangkan api di utara Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, dan Bukit Jantur telah

padam meski asap masih mengepul.

“Luas area terbakar kurang lebih 176,20 hektare, data berkembang,” kata Satriyo, Jumat (7/8) petang.

Operasi pemadaman dari udara dilaku-

kan menggunakan helikopter PK-DBM milik BNPB. Dalam satu sorti pada Jumat, helikopter tersebut melakukan empat kali rit dengan total 4.000 liter air yang diambil dari Danau Ranu Pani.

Dua helikopter bantuan, HU-4205 dan HU-4206, sementara kembali ke markas karena kendala teknis berupa ukuran braket dan obstacle di kawasan pengambilan air Ranu Pani serta Ranu Regulo.

Dari darat, BPBD Jawa Timur dan petugas gabungan melanjutkan penyekatan serta pemadaman dari bagian atas dan bawah tebing. Mereka menggunakan satu truk pemadam kebakaran, satu truk tangki BPBD Jawa Timur, satu mobil L300 yang membawa tandon air, dan satu drone water spray. “Tim gabungan melanjutkan upaya pemadaman di wilayah yang masih terdapat titik api,” ujar Satriyo.

Kebakaran tersebut pertama kali terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB. Akibat kejadian itu, Balai Besar Ta-

man Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menutup sebagian kawasan wisata hingga waktu yang belum ditentukan. Akses wisata dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang juga masih ditutup sementara.

Kondisi medan membuat operasi tidak mudah. Titik api berada di lereng Kaldera Bromo yang terjal dan dipengaruhi angin kencang. Vegetasi yang terbakar mencakup cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Hingga Jumat, tidak ada laporan korban jiwa akibat kebakaran tersebut.

Karhutla di kawasan Bromo menambah panjang catatan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi persoalan berulang di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Dalam penanganan karhutla berskala luas,

operasi water bombing telah menjadi salah satu metode yang digunakan pemerintah ketika medan sulit dijangkau melalui jalur darat. Penggunaan pesawat atau helikopter untuk menjatuhkan air juga lazim dilakukan di sejumlah negara yang menghadapi kebakaran hutan besar, termasuk Australia dan Amerika Serikat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah meninjau penanganan karhutla di Gunung Bromo. BPBD Jawa Timur bersama BB TNBTS dan BPBD Kabupaten Probolinggo, Malang, serta Lumajang terus memperkuat koordinasi. Penjagaan diperketat di sejumlah titik untuk mencegah api meluas ke wilayah Lumajang sekaligus memastikan titik api yang tersisa dapat dikendalikan. (*)

HUT ke-81 RI di Baubau Dimatangkan, Gerak Jalan Indah Jadi Agenda Utama Digelar 11-13 Agustus



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat koordinasi lintas unsur dan menyiapkan sejumlah agenda yang melibatkan masyarakat. Salah satu kegiatan utama ialah Lomba Gerak Jalan Indah yang dijadwalkan berlangsung pada 11-13 Agustus 2026.

Rangkaian gerak jalan tersebut akan mengambil rute dari Madrasah Aliyah menuju Rumah Jabatan Wali Kota Baubau. Kegiatan ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda yang menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus membuka ruang partisipasi bagi pelajar, organisasi, instansi pemerintah, dan masyarakat.

Asisten I Setda

Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos., M.Si., mengatakan kesiapan peserta, keterlibatan barisan, serta aspek kesehatan menjadi perhatian dalam pelaksanaan tahun ini. Panitia juga telah mengevaluasi penyelenggaraan sebelumnya untuk memperbaiki kualitas kegiatan.

"Penyelenggaraan tahun ini diharapkan berlangsung lebih tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta maupun masyarakat yang menyaksikan," kata La Ode Aswad, Rabu (5/8).

Pemantapan agenda dilakukan melalui rapat panitia yang melibatkan Wali Kota Baubau, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, jajaran TNI-Polri, serta unsur pelaksana lainnya. Pemerintah menilai koordinasi antarpihak penting agar seluruh kegiatan berlangsung sesuai ketentuan sekaligus tetap

memberikan ruang partisipasi yang luas kepada warga.

Selain gerak jalan, agenda utama peringatan kemerdekaan tetap mencakup upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih. Pemkot Baubau juga menyiapkan malam ramah tamah pada 17 Agustus 2026 di kawasan Pantai Kamali yang akan mempertemukan pemerintah, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan warga.

Peringatan kemerdekaan tahun ini memiliki konteks historis tersendiri karena menandai 81 tahun perjalanan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Secara internasional, momentum tersebut juga berada dalam periode pasca-Perang Dunia II ketika banyak wilayah di Asia dan Afrika memasuki gelombang dekolonisasi

dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.

La Ode Aswad menegaskan seluruh agenda dirancang dengan mengacu pada semangat perayaan kemerdekaan yang semarak, tetapi tetap mengutamakan keterlibatan dan keamanan. "Seluruh agenda utama tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemkot Baubau berharap perayaan HUT ke-81 RI tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat nasionalisme, persatuan, dan gotong royong. Pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan diharapkan turut menjaga semangat kemerdekaan sebagai bagian dari kehidupan sosial di daerah. (*)

HUT ke-81 RI di Baubau, Karang Taruna Wajib Taat Aturan Gerak Jalan Indah Dilarang Yel-Yel SARA



Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad SSos MSi

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau membuka ruang bagi Karang Taruna di seluruh kelurahan untuk ambil bagian dalam Lomba Gerak Jalan Indah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesempatan itu disertai aturan ketat mengenai ketertiban barisan, sikap peserta, hingga materi yel-yel yang dibawakan selama perlombaan.

Ketentuan tersebut terutama diarahkan untuk memastikan kegiatan yang berlangsung di Kota Baubau tetap menjadi ruang perayaan kemerdekaan yang aman, tertib, dan menjunjung persatuan. Panitia tidak membenarkan materi yel-yel yang mengandung penghinaan, melanggar norma kesopanan, atau menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Asisten I Setda Kota Baubau, La Ode Aswad, S.Sos., M.Si., Rabu (5/8), mengatakan setiap Karang Taruna tingkat kelurahan diperbolehkan mengirimkan satu barisan putra dan satu barisan putri. Den-

gan ketentuan itu, organisasi kepemudaan di tingkat kelurahan mendapat kesempatan mengambil bagian dalam agenda perayaan kemerdekaan.

"Yel-yel tidak diperkenankan mengandung unsur penghinaan, ujaran yang melanggar norma kesopanan, maupun materi yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," ujar La Ode Aswad.

Menurut dia, keikutsertaan peserta harus dibarengi kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perlombaan. Setiap barisan dituntut tampil rapi dan tertib serta mampu menjaga sikap selama kegiatan berlangsung.

Panitia juga menyiapkan tindakan tegas terhadap peserta yang mengabaikan aturan. Peringatan akan diberikan apabila ditemukan pelanggaran, sedangkan peserta yang tetap melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi hingga pembubaran barisan di lokasi perlombaan.

Pelibatan Karang Taruna dalam kegiatan kemerdekaan sekaligus menempatkan generasi muda sebagai bagian dari tradisi perayaan HUT RI. Secara

historis, gerak jalan dan berbagai perlombaan rakyat telah menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah Indonesia sejak masa awal republik, berkembang sebagai sarana membangun kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan makna kemerdekaan yang sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak hanya diperingati sebagai momentum politik, tetapi juga sebagai ruang memperkuat persatuan masyarakat. Dalam konteks internasional, perayaan hari kemerdekaan di berbagai negara juga kerap diisi kegiatan publik yang melibatkan masyarakat sebagai simbol identitas dan kebersamaan nasional.

Pemkot Baubau berharap keterlibatan Karang Taruna dalam Gerak Jalan Indah HUT ke-81 RI dapat berlangsung sportif dan tertib. Pemerintah juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat persatuan, sekaligus ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (*)

Jelang HUT RI ke-81, Dishub Baubau Matangkan Rekayasa Arus Lalu Lintas

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Baubau menyiapkan 38 personel, tujuh unit bus, penerangan jalan umum, serta rekayasa lalu lintas untuk memastikan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung aman dan tertib. Sejumlah ruas jalan yang diperkirakan mengalami peningkatan arus kendaraan telah dipetakan, termasuk kawasan Pantai Kamali dan jalur menuju Rumah Jabatan Wali Kota.

Kepala Dishub Kota Baubau, La Ode Muhammad Takdir, M.Si., mengatakan kesiapan tersebut merupakan bagian dari dukungan Dishub dalam kepanitiaan HUT ke-81 RI. Selain tergabung dalam Seksi Keamanan, Dishub juga mendapat peran dalam penyediaan transportasi, peneran-



Kepala Dishub Kota Baubau, La Ode Muhammad Takdir, M.Si.,

gan, serta dukungan teknis selama berbagai agenda peringatan berlangsung.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, 38 personel Dishub akan bekerja bersama Satpol PP dan Satuan Lalu Lintas Polres Baubau. Rekayasa arus diterapkan pada sejumlah agenda, termasuk Gerak Jalan Indah, upacara di Lapangan Betoambari atau Lembah Hijau, serta malam ramah tamah di Pantai Kamali. Beberapa ruas jalan akan ditutup sementara ketika upacara berlangsung

dan kendaraan dialihkan ke jalur alternatif.

Selain pengaturan lalu lintas, Dishub menyediakan tujuh unit bus untuk menunjang mobilisasi peserta kegiatan. Armada tersebut disiapkan bagi kebutuhan transportasi drum band, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), maupun panitia apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Dukungan teknis juga dilakukan menjelang pelaksanaan upacara. Dishub mengerahkan kendaraan sky lift untuk memban-

tu pengecatan tiang bendera di Lapangan Betoambari karena pekerjaan tersebut tidak memungkinkan dilakukan secara manual. Untuk kegiatan malam, armada Penerangan Jalan Umum (PJU) disiapkan guna mendukung renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP).

"Insya Allah dalam satu hingga dua hari ke depan seluruh titik penerangan sudah siap sehingga pelaksanaan renungan suci dapat berlangsung dengan baik," ujar Muhammad Takdir, Kamis (6/8).

Untuk agenda malam ramah tamah di Pantai Kamali, Dishub telah berkoordinasi dengan PLN terkait kebutuhan penerangan listrik. Di kawasan tersebut, pengaturan lalu lintas akan dilakukan bersama Satlantas Polres Baubau dan Satpol PP untuk menjaga kelancaran kendaraan selama kegiatan berlangsung.

Peringatan ke-

merdekaan pada 17 Agustus merupakan tradisi nasional yang telah berlangsung sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Secara historis, momentum itu menandai berakhirnya perjuangan menuju kemerdekaan dan menjadi agenda tahunan untuk memperkuat ingatan kolektif kebangsaan. Di tingkat

internasional, peringatan hari kemerdekaan juga menjadi tradisi banyak negara untuk mengenang proses pembentukan negara dan perjalanan kedaulatannya.

Muhammad Takdir mengimbau masyarakat mengukuti rambu, arahan petugas, serta jalur alternatif yang telah disiapkan. "Kami memohon maaf apabila

la selama pelaksanaan kegiatan terdapat pengalihan arus yang berdampak pada mobilitas masyarakat. Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan, mematuhi arahan petugas, tidak melawan arus, serta memanfaatkan jalur alternatif demi keselamatan dan kelancaran bersama," katanya. (*)